

RISALAH
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Senin
Tanggal : 25 Maret 2019
Pukul : 14.10 Wib
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Acara : Penyampaian/penjelasan Kepala Daerah terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2018.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
3. Drg. Raja Miskal
4. Harbaiyah
5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
6. Drs. Muhammad Zuhdi
7. Hesti Gustrian, S.ST
8. Eddy Tiawarman, SP
9. Azman, SE
10. Agustinus Purba, ST
11. H. Lamén Sarihi, SH, MH
12. Andreas Salim
13. Bani Suparti, A.Md
14. Sahak

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM

Turut Hadir : 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan
3. Setda Kabupaten Bintan
4. Kepala OPD Kabupaten Bintan
5. Eselon II, III dan IV di Pemerintah Kabupaten Bintan
6. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Senin, 25 Maret 2019 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai izinkan saya menyampaikan seabait pantun.

Ke pekan kuala membeli bingka
 Sayang pesanan terlupa adanya
 Dengan Bismillah Paripurna dibuka
 LKPJ Bupati Bintang menjadi agendanya

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Bintang. Yang terhormat saudara Wakil Bupati Bintang. Yang terhormat saudara Unsur Pimpinan dan segenap Anggota DPRD. Yang terhormat saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang. Yang terhormat saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV jajaran Pemerintah Kabupaten Bintang. Yang terhormat saudara para Camat, Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bintang. Yang terhormat saudara rekan-rekan Wartawan. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin para undangan yang berbahagia.

Mengawali acara Paripurna pada hari ini, kami mengajak kepada segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik hidayah serta ridhonya jua, maka pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dan bertemu kembali dalam keadaan sehat, guna mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang, dengan acara : "Penyampaian dan penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintang Akhir Tahun Anggaran 2018"

Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat Paripurna pada hari ini.

Bupati Bintang, hadirin undangan yang kami muliakan

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Bintang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Nomor 26 Tahun 2018 Pasal 99 dikatakan bahwa rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD. Dan pada Pasal 124 ayat (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal Rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Dengan mengucapkan Bismilahirrahmanirrahim rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang pada hari ini Senin, tanggal 25 Maret 2019 saya nyatakan di buka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Saudara Bupati dan hadirin yang kami muliakan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana diatur dala Pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LKPJ merupakan bentuk Pertanggungjawaban terhadap masyarakat, karena didalan LKPJ disampaikan secara transparan sehingga dapat kita hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dalam bentuk indikator pembangunan secara makro, sehingga capaian pelaksanaan program dan kegiatan setiap pembangunan dapat terukur. Baiklah hadirin yang berbahagia marilah kita sama-sama mendengarkan penyampaian dan penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda LKPJ Bupati Bintang Akhir Tahun Anggaran 2018.

Protokol :

Penjelasan Kepala Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintang Akhir Tahun Anggaran 2018. Kepada Bapak Bupati disilahkan.

H. Apri Sujadi, S.Sos / Bupati Bintang :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bintang Akhir Tahun Anggaran 2018. Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang. Bintang Buyu, Maret 2019 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bintang; Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bintang; Yang terhormat Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bintang serta Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kepala Kejaksaan Negeri Bintang, Kepala Fasharkan Mentigi Tanjung Uban, Komandan Satuan Radar 213 Sri Bintang; Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kepala OPD se-Kabupaten Bintang; Yang terhormat Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan LSM, serta insan pers dan undangan yang kami cintai.

Hadirin undangan yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Nota Pengantar ini, saya mengajak saudara-saudara semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat melanjutkan karya pengabdian kita demi kesejahteraan masyarakat Bintang yang sama-sama kita cintai.

Melalui forum yang terhormat ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintang, pimpinan partai politik dan seluruh jajaran aparatur birokrasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintang yang telah memberikan dukungan dan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan keberhasilan berbagai capaian agenda pembangunan daerah yang telah menjadi konsensus bersama sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan berbagai perencanaan sektoral yang telah ditetapkan.

Selanjutnya penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap komponen masyarakat Kabupaten Bintang, yang telah menjaga dan memelihara stabilitas keamanan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan aman dan lancar sesuai harapan kita bersama. Kondisi ini tentu saja harus kita syukuri dan pertahankan serta perlu ditingkatkan. Saya sungguh menaruh perhatian, harapan dan keyakinan yang tinggi apabila sikap tersebut mampu kita aplikasikan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi pada bulan April tahun 2019 ini kita akan melaksanakan sebuah agenda penting yaitu akan diselenggarakan pesta demokrasi dalam rangka keberlangsungan pemerintah Republik Indonesia yang tentunya melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya di Kabupaten Bintang. Saya mengajak segenap masyarakat Kabupaten Bintang agar memelihara suasana yang kondusif guna suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi yang hasilnya akan memilih anggota legislatif dan eksekutif di pusat maupun daerah yang akan mengawal pembangunan disegala bidang, Insha Allah semua program pembangunan daerah akan bisa terlaksana dengan baik dan Kabupaten Bintang bisa meraih kegemilangannya dimasa mendatang.

Peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018 merupakan LKPJ Tahun Ketiga dalam masa RPJMD periode tahun 2016-2021. Secara struktur APBD tahun 2018 disusun berdasarkan RKPD tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMD periode tahun 2016-2021, demikian pula target kinerjanya diukur berdasarkan RPJMD periode tahun 2016-2021. Selanjutnya akan dibahas secara internal oleh DPRD, guna menghasilkan rekomendasi perbaikan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, semangat dan makna penyampaian LKPJ ini memiliki kesamaan yakni dalam kerangka memperkuat keseimbangan peran (check and ballances) diantara elemen penyelenggara Pemerintahan Daerah, terutama antara DPRD dan Perangkat Daerah. Alhamdulillah dokumen LKPJ ini dapat kami susun, yang selengkapnyanya akan saya serahkan setelah penyampaian pengantar ini.

Hadirin yang saya hormati,

Kinerja Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2018 tidak akan terlepas dari dokumen RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, Kebijakan Umum Anggaran serta strategi dan prioritas APBD Kabupaten Bintan tahun 2018 yaitu : (1) Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Terutama Dibidang Pariwisata Dan Kelautan; (2) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dan Keterhubungan Antar Wilayah Dan Antar Pulau Untuk Mendukung Pertumbuhan Wilayah Secara Merata; (3) Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan; (4) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Tinggi Dengan Pelayanan Yang Terjangkau Dan Berkualitas; (5) Melestarikan Nilai-Nilai Dan Seni Budaya Melayu; (6) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa; (7) Meningkatkan Peran Generasi Muda Dan Prestasi Olah Raga; (8) Meningkatkan Produksi Dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Guna Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, segenap anggota DPRD Kabupaten Bintan serta hadirin yang berbahagia,

Dalam forum yang terhormat ini, perkenankan saya beserta **Wakil Bupati** untuk menyampaikan informasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dicapai sepanjang tahun 2018, baik berupa keberhasilan maupun permasalahannya yang memerlukan perhatian semua pihak yang akan saya awali dari gambaran realisasi APBD tahun 2018.

Walaupun informasi realisasi APBD ini bersifat tentatif karena perlu dilakukan audit atas laporan keuangan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** yang hingga saat ini masih berlangsung. Oleh karenanya, penyampaian LKPJ tahun 2018, merupakan rangkaian awal dari pelaporan kinerja pengelolaan APBD tahun 2018 yang Insha Allah akan ditindak lanjuti dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan APBD tahun 2018.

1. **Pendapatan Daerah** yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 1,01 triliun rupiah lebih, dapat direalisasikan sebesar 1,10 triliun rupiah lebih atau sebesar 109,44 persen. Capaian pendapatan daerah tahun 2018 melebihi target dari yang ditetapkan sebesar 95,50 milyar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut :
2. **Belanja Daerah**, terdiri dari **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**. Belanja Daerah pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar 1,18 triliun rupiah lebih

dan direalisasikan sebesar 1,06 triliun rupiah lebih atau mencapai sebesar 90,06 persen. Dengan rincian sebagai berikut : **Belanja Tidak Langsung** dialokasikan sebesar 528,76 milyar rupiah lebih dengan realisasi mencapai 488,59 milyar rupiah lebih atau 92,40 persen, sementara itu untuk **Belanja Langsung** dialokasikan sebesar 656,72 milyar rupiah lebih dapat direalisasikan sebesar 579 milyar rupiah lebih atau mencapai 88,17 persen.

3. **Pembiayaan Daerah** meliputi **Penerimaan Pembiayaan** yang terdiri dari **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)** dengan anggaran sebesar 176,14 milyar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 176,14 milyar rupiah lebih atau 100 persen, ditambah dengan realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu kami sampaikan gambaran umum pembangunan daerah Kabupaten Bintan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Bintan sebesar 157.927 jiwa dengan **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** sebesar 1,23 persen. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui pembangunan dibidang Pendidikan, Kesehatan serta percepatan pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan formulasi baru dalam perhitungan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, IPM pada tahun 2018 diestimasi sebesar 73,29 poin meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 72,91 poin. Sedangkan **Pendapatan Riil Perkapita** diestimasi mencapai 13,92 Juta Rupiah lebih. Seiring dengan dinamika dan tantangan ekonomi pada skala regional, nasional maupun global, capaian pembangunan dibidang ekonomi pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan **Laju Pertumbuhan Ekonomi** yang diestimasi sebesar 5,36 persen lebih tinggi dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 5,01 persen; Untuk **Laju Inflasi** sepanjang 2018 dapat dikendalikan sebesar 2,36 persen; sementara itu **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)** diestimasi mencapai 14 triliun rupiah lebih meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 13 triliun rupiah lebih.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi serta sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bintan secara berkesinambungan, dibutuhkan kerja keras serta sinergitas yang kokoh diantara seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam hal menurunkan Indeks Gini, menurunkan tingkat kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja untuk mengendalikan tingkat pengangguran terbuka.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Selanjutnya, kami sampaikan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis misi dan urusan Pemerintahan, sebagai berikut :

Misi Pertama, Mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai daerah tujuan investasi yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di bidang pariwisata dan kelautan yang diimplementasikan ke dalam Urusan Penanaman Modal, Penataan Ruang, Pariwisata, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan Dalam pelaksanaan **Urusan Penanaman Modal**, untuk mendukung Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi telah dioptimalkan sistem **One Stop Service** yaitu Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. Pada tahun 2018 realisasi **Investasi** yang berasal dari **Penanaman Modal Asing (PMA)** mencapai 696,86 juta US dolar lebih dan realisasi **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** sebesar 462,65 milyar rupiah lebih. Untuk izin investasi pada Tahun 2018, telah diproses sebanyak 1.062 izin investasi dan 222 izin non investasi.

Upaya dalam penyelarasan kebijakan **Urusan Penataan Ruang** di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sedang melakukan proses revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan. Pada Tahun 2018 ini Persentase tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang telah **mencapai 78 persen**.

Urusan Pariwisata merupakan urusan yang sangat strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Promosi pariwisata terus ditingkatkan dengan melaksanakan even-even Tahunan berskala Nasional maupun Internasional seperti **Tour De Bintan, Ironman Bintan, Bintan Triathlon, Festival Jong Bintan, Eco Run Mapur Island dan Sail Bintan**. Kegiatan ini telah mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat signifikan ke Kabupaten Bintan. Pada Tahun 2018 jumlah total kunjungan ke Kabupaten Bintan mencapai sebesar **1 juta lebih wisatawan** yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak **642.709 orang** dan wisatawan nusantara ataupun domestik sebesar **420.749 orang**.

Keberhasilan pembangunan bidang pariwisata ditandai dengan diraihnya beberapa penghargaan sekaligus antara lain **Juara Dua Tingkat Nasional Objek Wisata Terpopuler dalam ajang Pesona Indonesia 2018** dari Kementerian Pariwisata RI dan **Penganugerahan Indonesia Smart Nation Awards (ISNA) Tahun 2018** dari City Asia Center for Smart Nation (CCSN) Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia.

Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditujukan untuk penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan teknis, fasilitasi, dan akses pengusaha kecil dan usaha menengah koperasi pada lembaga keuangan dan perbankan. Keberhasilan pembangunan Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 dilaksanakan melalui berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro. Peningkatan kualitas dan kemampuan pengelola/ pengurus koperasi sehingga meningkatnya persentase koperasi aktif saat ini mencapai **58 persen atau 132 unit**. Dengan penambahan jumlah pengurusnya yang terlatih mencapai 300 orang. Sedangkan tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM terus meningkat dimana pada tahun 2018 ini mencapai 11.489 orang.

Untuk **Urusan Perikanan**, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan diantaranya pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan berupa pemberian asuransi nelayan kepada 573 orang serta penyaluran BBM untuk nelayan dengan total 11,9 juta liter. Untuk meningkatkan kapasitas pengembangan perikanan tangkap telah dilakukan pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil melalui penyediaan 5 jenis kapal penangkap ikan sebanyak 16 unit, 9 jenis alat tangkap dan 2 jenis sarana pendukung penangkapan ikan. Penyediaan 13 unit kapal penangkap ikan fiber 1 GT dan alat tangkapnya. Pada tahun 2018 diperoleh capaian kinerja bidang perikanan, produksi perikanan **mencapai 56 ribu ton lebih** yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar **54 ribu ton lebih** dan produksi perikanan budidaya sebesar **1.400 ton lebih**.

Untuk mendukung pemerintah mensukseskan program peningkatan gizi dan kesehatan keluarga, Pemerintah Kabupaten Bintan menggalakkan program menu

masakan serba ikan sehingga pada tahun 2018 Kabupaten Bintan telah mendapatkan penghargaan **Juara Dua Nasional Pada Lomba Masak Menu Serba Ikan** dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Urusan Perindustrian ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan penumbuhan berbagai jenis industri khususnya industri kecil dan menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui program pengembangan industri kecil dan menengah. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 469 unit IKM dengan nilai investasi mencapai 1,99 milyar rupiah lebih, dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 900 orang lebih.

Dalam penyelenggaraan **Urusan Perdagangan**, telah dilakukan upaya langkah-langkah pengamanan sediaan kebutuhan pokok masyarakat melalui pelaksanaan program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan, sementara itu dalam rangka menekan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang biasa terjadi menjelang bulan ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri telah dilaksanakan Operasi Pasar Murah.

Sementara itu dalam rangka mensukseskan program pemerintah yaitu Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bintan juga mendapatkan bantuan APBN sebesar 950 juta rupiah dari Pemerintah Pusat melalui Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dalam bentuk Pembangunan Pasar 1 unit di Desa Toapaya Selatan.

Misi Kedua, yaitu **Mewujudkan pelayanan infrastruktur daerah yang berkualitas, terintegrasi dan merata** yang diimplementasikan ke dalam urusan Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Urusan Pemerintahan.

Untuk penyelenggaraan **Urusan Perhubungan**, telah dilaksanakan peningkatan pelayanan angkutan bidang transportasi laut, melalui peningkatan pelayanan kepelabuhanan untuk 5 dermaga, bantuan operasional penyediaan transportasi laut kapal cepat bagi masyarakat yang akan ke Kecamatan Tambelan sempena libur Ramadhan dan perayaan hari raya idul fitri dan rehabilitasi dermaga dan ruang tunggu Kampung Mantang Lama di Kecamatan Mantang.

Peningkatan dan pengamanan lalu lintas angkutan melalui pembuatan marka jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas serta fasilitas perhubungan yang tersebar di sepanjang jalan Kabupaten Bintan.

Pada **Urusan Pekerjaan Umum**, di bidang infrastruktur jalan, pada tahun 2018 telah dilaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi jalan dan jembatan. Melalui kegiatan tersebut telah terealisasi jalan sepanjang lebih kurang 15 Kilometer, sehingga sampai dengan tahun 2018 panjang jalan yang telah dibangun sepanjang lebih kurang 62 kilometer.

Infrastruktur air bersih juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bintan yaitu melalui pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah pesisir Bintan. Pada tahun 2018 telah ditingkatkan, dioptimalisasi dan dikembangkan 7 unit SPAM IKK yang terdiri dari 1 unit SPAM IKK Perkotaan dengan akses mencapai 2.639 sambungan rumah di kecamatan Gunung Kijang dan 6 unit SPAM IKK Perdesaan dengan akses sebanyak 1.831 sambungan rumah di kecamatan Tambelan, Bintan Pesisir, Toapaya, Teluk Bintan dan Bintan Timur.

Kebijakan pembangunan dalam **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** ditujukan untuk mengurangi kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, penyediaan tempat pembuangan sampah, penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemakaman umum dan lampu jalan. Upaya yang telah dilakukan antara lain Pembebasan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Bintan Utara, Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum dan Sosial, Pembangunan Jalan Semenisasi/Paving Block dan Buras, Pembangunan Talud/Dinding Penahan Tanah, Pembangunan Pelantar/Tambatan Perahu, Penataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan, Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum melalui pengadaan serta pemeliharaan lampu-lampu jalan yang tersebar di tempat yang strategis serta Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Areal Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di seluruh kecamatan. Untuk meningkatkan kapasitas pengembangan kinerja air minum dan air limbah telah dilaksanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal di Kecamatan Bintan Timur dengan bantuan dana APBN.

Berkenaan dengan penanganan persampahan telah dilaksanakan program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan, pelaksanaan program **Bank Sampah**, jumlah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan telah mencapai 27 kelompok. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain sosialisasi dan promosi **Gerakan Bintan Bersih**. Upaya tersebut telah meningkatkan **persentase penanganan sampah** hingga mencapai **91 persen**. Keberhasilan ini juga dibuktikan dengan diperolehnya kembali **Penghargaan Adipura untuk Kategori Kota Kecil dan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk Sekolah Dasar Negeri 001 Seri Kuala Lobam melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018**.

Demikian pula untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bintan, khususnya di wilayah perbatasan, pemerintah telah melakukan upaya melalui Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Kegiatan Peningkatan Ekonomi Wilayah Perbatasan dan Pengelolaan monitoring serta evaluasi Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis sebagai langkah melayani masyarakat dengan sepenuh hati yang diimplementasikan ke dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Perencanaan Pembangunan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kearsipan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Dalam Pelaksanaan Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, upaya memantapkan kinerja Pemerintah Daerah tidak terlepas dari efektifitas pendayagunaan sumber daya aparatur yang tersedia dilingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga terus meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan indikator kinerja persentase bidang pelayanan dasar yang telah mencapai Standar Pelayanan Minimal sebesar 100 persen.

Pada aspek penyelenggaraan administrasi bidang keuangan pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan kembali mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk tujuh kali berturut-turut, sebagai capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya semakin diarahkan pada perbaikan citra dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang kian bersih dan terhindar dari **mal-praktek** penyelenggaraan Pemerintahan. Upaya telah dibentuknya **Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pembertasan Korupsi**. Salah satu rencana aksi yang konisten dilakukan adalah **Pelaksanaan Trasparansi Proses Pengadaan Publik Pemerintah**. Sampai dengan tahun 2018 melalui penerapan *e-procurement* Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan penghematan APBD sebesar **12,70 milyar lebih**. Kemudian untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal; Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Bintan kembali meraih **Predikat Baik atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018** yang secara langsung diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dan untuk penyelenggaraan pemerintah yang telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah mendapatkan **Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)** dengan menduduki ranking 19 dari 397 Kabupaten di seluruh Indonesia. Bersama saudara **Wakil Bupati**, saya akan terus berupaya mencermati serta mengambil langkah-langkah perbaikan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maupun mempertajam pembinaan dan pengawasan anggaran terhadap seluruh organisasi perangkat daerah. Hal demikian, kiranya merupakan agenda besar yang akan dilakukan sejalan dengan upaya yang tengah ditegakkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selanjutnya **Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan**, diawali dengan kondisi sinergitas antar organisasi perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan mulai dari proses perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (**MUSRENBANG**), proses penyusunan anggaran hingga pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD yang keseluruhannya makin diarahkan pada keterpaduan peran dan kebutuhan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah serta membentuk mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara maupun *stake holder* pemerintah daerah, Kabupaten Bintan telah melakukan inovasi pengembangan aplikasi *e-gov* yang mencakup *e-planning*, *e-budgeting* dan *simonev*, Pelaksanaan *Sustainable Development's Goals (SDG's)*, **Koordinasi Program Kabupaten Sehat**, Kajian-kajian strategis yang diharapkan dapat melahirkan inovasi baru.

Selanjutnya pada bidang **penegakan hukum dan hak asasi manusia** di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah telah dilakukan penetapan berbagai peraturan daerah sebagai instrumen penegakan hukum melalui pelaksanaan program **Penataan Peraturan Perundang-Undangan**. Pada tahun 2018 telah berhasil ditetapkan sebanyak 9 Peraturan Daerah, disamping itu telah dilakukan publikasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi peraturan daerah serta litigasi dan non litigasi. Capaian kinerja untuk bidang hukum ditunjukkan dengan diraihnya kembali penghargaan skala nasional dari **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

(HAM) dalam bentuk Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan melalui implementasi **Sistem Administrasi Kependudukan** yang mengintegrasikan pengolahan data dari 10 kecamatan dan satu rumah sakit umum daerah ke jaringan di Kementerian Dalam Negeri sehingga terwujudnya pelayanan dokumen kependudukan didukung dengan administrasi sistem aplikasi barcode yang akurat dan valid untuk masyarakat Bintan. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah melaksanakan perekaman e-KTP mencapai 102.970 orang atau 96 persen lebih dari penduduk yang wajib ber-KTP seiring dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan yang mencapai **1 persen**.

Berkaitan dengan upaya menumbuh kembangkan maupun meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan terus menghimbau melalui media elektronik dan juga melaksanakan program pengembangan perpustakaan sehingga jumlah perpustakaan yang tersebar di kecamatan hingga tahun 2018 mencapai 199 taman bacaan dengan jumlah pemustaka yang meningkat secara signifikan sebesar 56 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 26.295 pemustaka serta judul koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah telah mencapai 11.454 judul.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik yang dinamis serta menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan dan mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang harmonis telah dilaksanakan Program Pembinaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pembentukan dan Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang beranggotakan Tokoh Masyarakat lintas etnis dan agama, Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Masyarakat dan Koordinasi **Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)**.

Misi Keempat, Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta kualitas SDM agar bisa bersaing dalam kompetisi global, yang diimplementasikan ke dalam Urusan Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Ketenagakerjaan.

Dalam **Urusan Pendidikan**, Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar **20 persen dari total APBD**. Tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan Bidang Pendidikan baik yang menggunakan Anggaran APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan untuk rehabilitasi serta Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar dilengkapi dengan fasilitas pendukung belajar mengajar sebanyak 13 unit dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD sebanyak 34 unit dan SMP sebanyak 7 unit serta pengadaan dan perlengkapan meubiler; pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional **BOSNAS-SD/MI/SDLB** kepada 17.959 siswa di 96 SD Negeri dan Swasta, masing-masing siswa mendapatkan 800 ribu rupiah. Sedangkan **BOSNAS-SMP/MTs** diberikan kepada 6.969 siswa untuk 28 SMP Negeri masing-masing siswa memperoleh 1 juta rupiah, sehingga untuk Tahun 2018 BOS dari Pemerintah Pusat diberikan kepada pendidikan dasar jenjang SD sebesar **13,57 milyar rupiah lebih**, dan SMP sebesar **6,95 milyar rupiah lebih**.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme tenaga pendidik, antara lain telah dilaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; Melalui DAK telah disalurkan bantuan operasional kepada 2 sekolah Taman Kanak-Kanak di Bintan Timur dan Bintan Utara, rehab bangunan TK dan lembaga PAUD serta pembangunan 3 unit lembaga PAUD.

Keberhasilan dibidang pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya **Angka Rata-Rata Lama Sekolah** yang telah mencapai **8,36 tahun** pada tahun 2018; **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI** tahun 2018 mencapai **104,62 persen** dengan **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI** sebesar **99,69 persen** dan **APK SMP/MTs** mencapai **97,35 persen** dan **APM SMP/MTs** **86,73 persen** sehingga diperoleh penghargaan dan prestasi bidang pendidikan ditingkat Nasional pada tahun 2018 antara lain **Penghargaan Indeks Kelola Tahun 2018** dari Deputi Bidang Ekonomi Staff Kepresidenan karena keberhasilan Kabupaten Bintan dalam mengelola secara efektif APBD dan program kerja dalam bidang Pendidikan dan penghargaan **Penghargaan Ki Hajar Award Tahun 2018** dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembangunan **Urusan Kesehatan**, keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan meningkatnya **Angka Harapan Hidup (AHH)** dari sebesar **70,12 tahun** pada tahun 2017 meningkat menjadi **70,18 tahun** pada tahun 2018. Meskipun terjadi peningkatan indeks kesehatan, namun tampaknya masih diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral agar perbaikan derajat kesehatan yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya angka harapan hidup dan terus menurunnya angka kematian ibu dan bayi secara signifikan dapat terwujud dimasa mendatang.

Sementara itu persentase Balita Gizi Buruk juga menunjukkan tren yg terus menurun setiap tahun. Penurunan ini disebabkan adanya intervensi Tim Asuhan Gizi di tingkat puskesmas maupun rumah sakit. Sementara itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu, telah dilaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang melayani masyarakat menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun 2018 jumlah masyarakat yang terlayani meningkat sangat signifikan yaitu 15.500 jiwa atau 54,92 persen. Sementara itu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mensukseskan Program Keluarga Berencana ditunjukkan dengan cakupan **peserta KB aktif yang mencapai 85,96 persen** terhadap pasangan usia subur. Untuk keberhasilan program Keluarga Berencana dan menciptakan **Kampung Keluarga Berencana** ini Pemerintah Kabupaten Bintan bersama PKK Kabupaten Bintan telah meraih penghargaan **Manggala Karya Kencana** dari Pemerintah Pusat. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga telah memberikan pula penghargaan **Kabupaten Sehat Tahun 2018** dan **Pastika Parama Tahun 2018**.

Selanjutnya, **Urusan Ketenagakerjaan**, upaya yang dilaksanakan pada urusan bidang ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Bintan yang diwujudkan melalui program perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian upaya untuk peningkatan jaminan sosial tenaga kerja telah dilakukan koordinasi kebijakan pengupahan terkait dengan **Kebutuhan Hidup Layak** yang telah menyepakati dan menetapkan **Upah Minimum Kabupaten Bintan tahun 2018** yang telah mencapai sebesar 3,11 juta rupiah lebih.

Misi Kelima, Mewujudkan pembangunan karakter masyarakat yang religius dan berbudaya Melayu sebagai landasan pembangunan masyarakat, menjadi prioritas urusan Kebudayaan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Untuk **Urusan Kebudayaan**, sepanjang tahun 2018 ditandai dengan semaraknya berbagai aktifitas kebudayaan, sebagai cerminan dari cukup kondusifnya iklim kebebasan, kreatifitas maupun ruang publik untuk berekspresi seperti pelaksanaan pagelaran panggung seni dan budaya, festival tari dan pentas rakyat

yang menampilkan berbagai macam kesenian dan permainan rakyat yang ada di Kabupaten Bintan serta pelaksanaan pawai budaya.

Misi Keenam yaitu Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan yang diimplementasikan ke dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berkenaan dengan **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, telah dilaksanakan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang melibatkan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam penerapan pengarusutamaan gender, ditunjukkan dengan meningkatnya angka **Indeks Pembangunan Gender** yang mencapai 92,58 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kesetaraan gender di Kabupaten Bintan telah berjalan dengan baik. Dan pada tahun 2018 untuk kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Bintan berhasil meraih **Anugerah Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya** dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Dalam **Urusan Sosial** pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 11.616 jiwa, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 107 unit rumah, dengan Total Anggaran sebesar 2,74 milyar rupiah lebih terdiri dari 125 unit rumah dibiayai dengan APBD Kabupaten Bintan. Untuk mensukseskan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bintan telah dilaksanakan pemberian bantuan permodalan dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masing-masing mendapatkan 30 juta rupiah, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemberdayaan sosial kemasyarakatan telah dilaksanakan pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan membina kerjasama dengan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Kabupaten Bintan melalui kegiatan bhakti sosial, Program Keluarga Harapan dengan 3.381 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan sosial non tunai kepada 8.809 Rumah Tangga senilai 4,17 milyar rupiah lebih.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa diantaranya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan yang direalisasikan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa pemberian bantuan modal sebesar 50 juta rupiah untuk 34 unit BUMDes, dengan sumber dana APBN. Sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk 34 unit BUMDes di seluruh Kabupaten Bintan.

Terkait dengan pembangunan Desa, pada tahun 2018, APBD Desa yang dianggarkan oleh pemerintah mencapai **93,26 miliar** rupiah lebih dengan rincian **Dana Desa dari Pemerintah Pusat** mencapai 30 miliar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 27,58 milyar lebih atau 89 persen dan **Alokasi Dana Desa** dari Pemerintah Daerah mencapai 53 miliar rupiah lebih dengan realisasi mencapai 46 persen. Pada Tahun 2018 Propinsi Kepulauan Riau memberikan apresiasi terhadap keberhasilan pelaksanaan **Dana Desa tahun 2017** dengan mendapat posisi terbaik ke 2 se-Kepulauan Riau. demikian pula dengan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan fisik, **Kabupaten Bintan** telah berhasil meraih predikat terbaik untuk tingkat Propinsi Kepulauan Riau.

Kerja keras yang terwujud antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Daerah Bawahan ini juga telah menghasilkan **Penghargaan Desa dan Kelurahan Terbaik 2018** dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

Peserta Rapat Paripurna DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Misi Ketujuh, Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan yang diimplementasikan ke dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2018 telah dilakukan pembinaan atlet dalam rangka meningkatkan prestasi serta mempersiapkan atlet untuk mengikuti pertandingan ditingkat propinsi maupun nasional yang telah menghasilkan 200 atlet dari berbagai cabang olah raga; Sementara itu untuk mengembangkan keperibadian untuk membentuk karakter tangguh dan memadukan konsep kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual secara terintegrasi dan transedental telah dilaksanakan pelatihan ESQ yang diikuti sebanyak 70 orang pemuda dan mahasiswa. Capaian prestasi pada urusan Kepemudaan ini adalah **Predikat Gerakan Pramuka Tergiat Tingkat Kwarda Propinsi Kepulauan Riau** dari Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau.

Berkenaan dengan pelaksanaan misi yang terakhir yaitu **Mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan**, yang diimplementasikan di dalam Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup. Pembangunan **Usuran Pertanian** dilakukan dengan meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman perkebunan berkelanjutan dan hortikultura ramah lingkungan. Upaya dalam urusan ini telah menghasilkan produksi tanaman sayuran pada tahun 2018 yang mencapai **16 ribu ton lebih** dan produksi tanaman buah-buahan mencapai sebesar **12 ribu ton lebih**. Hasil produksi ini **telah mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal**. Terkait dengan produksi komoditi unggulan perkebunan seperti Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Cengkeh dan Lada produksinya ditahun 2018 mencapai 12 ribu ton lebih.

Untuk peningkatkan produksi hasil peternakan telah dilakukan pengembangan ternak masyarakat kelompok tani di beberapa kecamatan seperti budidaya ternak unggas dan kambing; pelayanan kesehatan masyarakat **veteriner** melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan hewan. Sehingga adanya peningkatan Produksi Daging dan Telur sebesar **4.765 Ton** dari target yang telah ditetapkan.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Demikian pokok-pokok penyampaian kinerja Pemerintahan Daerah sebagai gambaran progres pengelolaan seluruh misi pembangunan. Kiranya berbagai substansi kinerja yang termuat secara utuh dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2018 akan menjadi **referensi objektif** bagi seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam menilai **efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang dilakukan sepanjang tahun 2018.

Keberhasilan, tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2018 merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus kita selesaikan bersama dan merupakan *lesson learned* bagi berbagai pihak dalam menyongsong percepatan perwujudan **Bintan Gemilang 2025**. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyampaian nota pertanggungjawaban ini. Kiranya hal tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi kita semua. **Insha Allah**, upaya membangun tata pemerintahan yang baik akan lebih cepat terlaksana jika kita semua senantiasa melaksanakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam mewujudkan berbagai program-program pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga mencapai sasarannya.

Sebelum saya akhiri penyampaian Nota Pengantar LKPJ ini terlebih dahulu izinkan saya untuk menyapaikan pantun sebagai adat resam melayu sebagai berikut :

Putri raja pergi ke pekan
 membawa ketupat untuk dimakan
 LKPJ sudah disampaikan,
 kiranya dapat diparipurnakan
 Teruna berdendang menari zapin
 Naik perahu ke pulau telang
 Tiga tahun berselang asri memimpin
 Melangkah menuju bintang gemilang

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bintan, Apri Sujadi ditandatangani.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih kepada saudara Bupati Bintan yang telah menyampaikan penjelasan Kepala Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2018.

Protokol :

Unsur Pimpinan, Bupati dan Wakil Bupati Bintan disilahkan mengambil tempat, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan dan kepala BKAD Kabupaten Bintan.

Dilanjutkan dengan penyerahan LKPJ Bupati Bintan dari Bupati Bintan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan

(Pelaksanaan penyerahan LKPJ Bupati Bintan dari Bupati Bintan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bintan)

Unsur Pimpinan dan Bupati Bintan disilahkan kembali ke tempat. Penutupan rapat Paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Demikian rangkaian acara yang telah kita ikuti bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil 'alamin rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Senin, tanggal 25 Maert 2019 dengan ini resmi saya nyatakan ditutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebaait pantun, yakni :

Menjual bilis sampai ke pekan
 Bilis berasal dari laut Bintan
 Catatan dan Rekomendasi segera diberikan
 Untuk penyempurnaan LKPJ Bupati Bintan

Protokol :

Demikian rapat Paripurna pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.55 wib.

NOTULIS,



NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

KABAG PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



RITA YUNIATI, S.Pi, MM
NIP.19720630 199803 2 010

KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
DAN PUBLIKASI



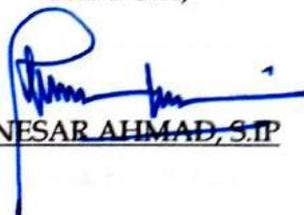
SUMADIYO, SE
NIP.19740120 200604 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680508 198810 1 001

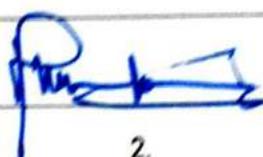
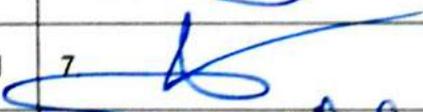
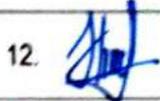
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,

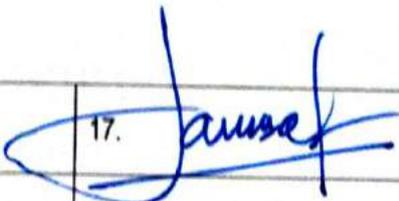
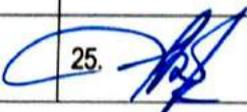


H. NESAR AHMAD, S.IP

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA TERBUKA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

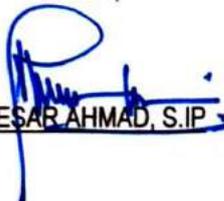
HARI : Senin
TANGGAL : 25 Maret 2019
WAKTU : 14.10 s/d 15.55 wib
ACARA : Penyampaian dan Penjelasan Kepala Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2018

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	HARBAIYAH	WAKIL KETUA KOMISI II	8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15. 
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 

17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17. 
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18.
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19.
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21.
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23.
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25. 

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,


H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

HARI : Senin
 TANGGAL : 25 Maret 2019
 WAKTU : 14.10 s/d 15.55 wib
 ACARA : Penyampaian dan Penjelasan Kepala Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintang Akhir Tahun Anggaran 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.	Nahamuffia	Kepala BPPD	2.
3.	Murtidyanji, R.S.Si, M.Eng	Kasir Penunjang dan POC Bupati	3.
4.	HOSNI	KABID SMP	4.
5.	ASRI	Kabid PSLB3	5.
6.	JULPITR	Kanib Umum Duri	6.
7.	RAEV	Seh DKPP	7.
8.	Syamsibar	IRBAN I	8.
9.	Yeni Eranni	IRBAN II	9.
10.	YURET	KABAN BUAPEWDA	10.
11.	ARIEF SUMARSONO	Plt. Camat Gn. Kabung	11.
12.	ANDRIAC	Kasi Kerasan Pengas	12.
13.	A. MIRAJ	KOGIA KR KPRD	13.
14.	Netki.S	Kabid Taling	14.
15.	HASFI	DISDAM	15.
16.	GULIA FARMA	KASR DISTRIBUSI PANGKATN	16.
17.	Floresia	Kas Kesmasuk & PPH	17.
18.	Rupa Samate	Konwifko	18.
19.	F. Djundir	Kabid KPP	19.
20.	COROSU PURAMA	Kasir arsitek dan orodutor	20.
21.	R. Lukman	CAKUPAN BICARA	21.

22.	DEKI DARLUS	Kewablay. KESOS	22.
23.	Mandiani	Kasubag. Paub. Mangarabud	23.
24.	M FACHRIMUSTAN	KADIS.	24.
25.	ARIYANTO	KA UPTD PLH	25.
26.	Hadiad	Sebidang BINA	26.
27.	M. HERSYAN	KABID DAH	27.
28.	POUNO SPARIS NOT	KASI LBS DAH	28.
29.	Elo Aprianto.	Ka BPS Binaan	29.
30.	RUM ACIB	INSPEKTUR	30.
31.	AURITAYAN	CAMAT SKL	31.
32.	PENG ANGRANI	Kec Tegalaya	32.
33.	JANSURI	Secretaris	33.
34.	Kartini	Ass ui	34.
35.	Henry W	POPR	35.
36.	Pihihan	Kec. Mantay	36.
37.	Azwari	loban II	37.
38.	IPUNG -	Prum	38.
39.	Sudarusanto	Sebr. BKPSDM	39.
40.	OICPO - I	Kabidbag	40.
41.	M. S. Japnur	Kabid yan ren sos Dinos.	41.
42.	ERICE RA PUTI	KASI REHABILITASI SOCIAL	42.
43.	MASLOMI	KABID DIK SOS	43.
44.	Ismael	Kasubid Cipta	44.
45.	Wan Rudy J	Budpro.	45.
46.	SRI HENY	CAM SERBAG	46.
47.	P. Muli anuk	Sutpa	47.
48.	Esi Rizki	DPAD	48.
49.	HENDRIAN Anhal	CPTD. BILUW	49.
50.	RUCI Anisa	BKPSDM	50.

51.	Yandriye	BRAD	51.	
52.	IDRIS	Lesah pabizuan	52.	
53.	Kidra Hidayat	Bisnaker	53.	
54.	Zulkhairi	Camat Bujur	54.	
55.	Hesam.	Kely Pabizuan	55.	
56.	Zurkhan Adnan	Katua pemulu	56.	
57.	Ary Sulwi	Kebag Paeconomig	57.	
58.	Ramlah	Kabid Kodanuratan Plogstik	58.	
59.			59.	
60.			60.	
61.			61.	
62.			62.	
63.			63.	
64.			64.	
65.			65.	
66.			66.	
67.			67.	
68.			68.	
69.			69.	
70.			70.	
71.			71.	
72.			72.	
73.			73.	
74.			74.	
75.			75.	
76.			76.	
77.			77.	
78.			78.	
79.			79.	

RISALAH
RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Senin
Tanggal : 25 Maret 2019
Pukul : 16.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan
Acara : Pengesahan Panitia Khusus pembahasan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2018.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
3. Drg. Raja Miskal
4. Harbaiyah
5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
6. Drs. Muhammad Zuhdi
7. Hesti Gustrian, S.ST
8. Eddy Tiawarman, SP
9. Azman, SE
10. Agustinus Purba, ST
11. H. Lamén Sarihi, SH, MH
12. Andreas Salim
13. Bani Suparti, A.Md
14. Sahak

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, M

JALANNYA RAPAT

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih kepada rekan-rekan Anggota DPRD yang masih bertahan untuk melanjutkan Paripurna kita yang kedua, yakni pembentukan komposisi keanggotaan Panitia Khusus yang akan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran 2018 yang baru saja disampaikan oleh Bupati Bintan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Anggota Dewam yang saya hormati,

Sebagaimana yang kita ketahui biasanya Anggota Panitia Khusus yang akan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini beranggotakan dari Panitia

Anggaran, hanya saja sesuai dengan Tata Tertib DPRD No. 26 Tahun 2018 Pasal 74 Ayat 1 yang berbunyi jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) orang, sementara Badan Anggaran berjumlah 12 orang, jadi harus dikeluarkan 2 orang. Bagaimana rekan-rekan Anggota, kira-kira siapa yang akan dikeluarkan.

Suardi, S.Sos / Anggota Komisi III :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pimpinan kami dari Fraksi Golkar disini sudah 3 (tiga), jadi izin saya mengundurkan diri dari Badan Anggaran.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih pak Suardi, berarti tinggal 1 (satu) orang lagi yang harus dikeluarkan, bagaimana rekan-rekan, silahkan.

Bani Suparti, A.Md / Anggota Komisi III :

Izin Pimpinan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Silahkan Ibu Bani..

Bani Suparti, A.Md / Anggota Komisi III :

Terima kasih Pimpinan, yang terhormat Pimpinan DPRD beserta Anggota yang saya hormati. Di Badan Anggaran kami juga ada 3 (tiga) perwakilan dari Partai Demokrat, saya juga izin untuk mengundurkan diri dari Badan Anggaran, terima kasih.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Pimpinan Rapat :

Terima kasih rekan-rekan Anggota atas masukannya, berarti sudah genap 10 (sepuluh) orang yang akan melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Dengan demikian akan saya bacakan komposisi keanggotaan Panitia Khusus LKPJ antara lain :

Ketua	: Drg. Raja Miskal
Wakil Ketua	: Hesti Gustrian, S.ST
Sekretaris	: Hj. Fiven Sumanti, S.IP
Anggota	: 1. H. Nesar Ahmad, S.IP
	2. Agus Wibowo
	3. H. Tri Jono, S.Kom, MM
	4. Muttaqin Yasir
	5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
	6. Drs. Muhammad Zuhdi
	7. Zulkifli, S.Pd

Demikian komposisi keanggotaan Panitia Khusus LKPJ yang diberi waktu selama 30 hari setelah LKPJ ini disampaikan oleh Bupati. Kepada rekan-rekan Anggota Panitia Khusus LKPJ saya ucapkan selamat bertugas semoga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabil'alamin rapat Paripurna ini saya tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 16.10 wib.

NOTULIS,



NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

KABAG PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



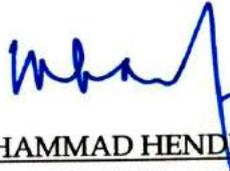
RITA YUNIATI, S.Pi, MM
NIP.19720630 199803 2 010

KASUBBAG PERSIDANGAN, RISALAH
DAN PUBLIKASI



SUMADIYO, SE
NIP.19740120 200604 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680508 198810 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA II,



H. TRIJONO, S.Kom, MM